

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR TAHUN 2025)**

Amudi Perandes Pasaribu

Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

Email Korespondensi: fransamudi07@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the DKI Jakarta Provincial Government's waste management policy for 2025, specifically within the Administrative City of East Jakarta, where the accumulation and annual increase of waste pose significant challenges. A qualitative approach was employed, utilizing data collection methods such as observation, interviews, and document analysis. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively based on the policy implementation model proposed by Edwards III (1980), covering indicators of communication, resources, implementer attitudes, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the DKI Jakarta Provincial Government's waste management policy—particularly in East Jakarta—has not yet proceeded optimally. Human resources for waste management operations remain inadequate due to budgetary constraints, resulting in deficiencies regarding both the quality and quantity of personnel. Furthermore, administrative sanctions outlined in the policy have not been strictly enforced against the public in East Jakarta, contributing to the continued annual accumulation of waste. A lack of public participation and support for waste management efforts in the area further hinders attempts to reduce waste piles. These issues are exacerbated by limited waste management technology in DKI Jakarta, public indifference toward the environment (manifested in littering and the consumption of single-use packaged foods), and a lack of strict regulation regarding producers who utilize plastic packaging—all of which drive the continued increase in waste, particularly in East Jakarta. Consequently, a more comprehensive and sustainable public policy analysis is required to improve waste management implementation in the Administrative City of East Jakarta.

Keywords: Public policy, Policy implementation, Waste management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah tahun 2025, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur. Penumpukan sampah dan meningkatnya sampah setiap tahunnya menjadi permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980), yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur belum berjalan secara optimal. Sumber daya manusia pada pelaksana pengelolaan sampah masih rendah yang di akibatkan oleh keterbatasan sumber daya anggaran, menyebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas para pelaksana dalam pengelolaan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur. Selain itu penerapan isi kebijakan pada sanksi administrasi yang belum di jalankan serta belum tegas di terapkan kepada masyarakat khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur sehingga membuat sampah semakin menumpuk dan terus bertambah setiap tahunnya, serta kurangnya dukungan partisipasi masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur terhadap pengelolaan sampah menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah untuk mengurangi tumpukan sampah yang terus semakin bertambah.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

490

Indexed



setiap tahunnya, dan di perparah dengan teknologi pengelolaan sampah yang minim seperti yang ada di DKI Jakarta serta perilaku masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan membuang sampah sebarangan, dan mengkonsumsi makanan dengan kemasan sekali pakai sehingga sampah akan terus bertambah, dan kurangnya penegasan kepada produsen yang membuat produk dengan kemasan plastik yang membuat sampah terus bertambah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur. Sehingga di perlukan analisis kebijakan publik yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam meningkatkan pelaksanaan pengelolaan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kata kunci: Kebijakan publik, Implementasi kebijakan, Pengelolaan sampah.

PENDAHULUAN

Sampah merupakan satu diantara banyak masalah lingkungan yang dialami oleh semua negara di dunia (Bundhoo, 2018). Seiring dengan peningkatan aktivitas manusia, timbulan sampah mengalami peningkatan pula (Chen et al., 2020). Dampak yang terjadi jika sampah tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, sebagaimana dijelaskan identifikasi lima masalah utama: polusi, emisi gas rumah kaca, kebakaran, penyakit, dan erosi (Chandrappa & Das, 2012). Polusi terjadi akibat pencemaran tanah, air, dan udara dari sampah yang menumpuk, sementara emisi gas rumah kaca seperti metana dari pembusukan sampah berkontribusi pada perubahan iklim.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik di negara berkembang sering disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti kurangnya infrastruktur persampahan yang disediakan oleh pemerintah, seperti fasilitas untuk pengumpulan, pemindahan, dan pemadatan sampah, yang menghambat proses pengelolaan yang efisien (Abubakar et al., 2022). Selain itu, kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan atau kurangnya partisipasi dalam pemilahan, memperburuk masalah ini dan mengurangi efektivitas program pengelolaan (Ferronato & Torretta, 2019). Kombinasi antara keterbatasan infrastruktur dan perilaku masyarakat ini menunjukkan perlunya intervensi pemerintah dan edukasi komunitas untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di negara berkembang.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah perkotaan dan rumah tangga. Dengan mengalami pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan peningkatan konsumsi, timbulan sampah di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Indonesia menghadapi masalah sampah yang serius sebagai salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia. Dampak yang ditimbulkan jika sampah dibiarkan menyebabkan gangguan kesehatan karena menimbulkan berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, pencemaran tanah, air dan kurangnya nilai kebersihan dan keindahan lingkungan (Nugraha et al., 2018). Akar masalah sampah terletak pada pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat, yang meningkatkan produksi sampah tanpa infrastruktur yang memadai, serta perilaku konsumtif masyarakat yang menghasilkan sampah plastik dan organik dalam jumlah besar (Daniel Hoornweg, 2012).

Permasalahan sampah di Provinsi DKI Jakarta merupakan isu strategis yang semakin kompleks seiring dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk. Kondisi demografis tersebut berdampak langsung pada meningkatnya volume timbulan sampah perkotaan. Aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang terus berkembang turut memperbesar jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Produksi sampah tahunan menunjukkan peningkatan konsisten setiap tahun sampai 2025 mencapai angka 3.351.057,14 ton. Kurangnya pengelolaan sampah menjadi faktor utama pendorong lonjakan timbulan sampah (Purwaningrum, 2016). Pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan tersebut sehingga ketimpangan ini menimbulkan tantangan serius dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan. Dengan demikian permasalahan sampah di DKI Jakarta tidak terlepas dari dinamika pengelolaan sampah dan kebijakan pengelolaan.

Tabel 1: Angka Timbulan Sampah DKI Jakarta Tahun 2023-2025

Tahun	Angka Timbulan Sampah
2023	3.141.648,02 Ton
2024	3.171.247,6 Ton
2025	3.351.057,14 Ton

Sumber: SIPSN, 2026

Dari data diatas Angka Timbulan Sampah DKI Jakarta Tahun 2023–2025, terlihat adanya peningkatan timbulan sampah yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah timbulan sampah tercatat sebesar 3.141.648,02 ton, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 3.171.247,6 ton, dan kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2025 hingga mencapai 3.351.057,14 ton. Kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 relatif moderat, namun lonjakan pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan timbulan sampah yang lebih tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Data mengenai timbulan sampah pada masing-masing kota administrasi menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui perkembangan volume sampah dari tahun ke tahun. Adapun data timbulan sampah pada setiap kota di DKI Jakarta selama periode beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2: Angka Timbulan Sampah Tiap Kota di DKI Jakarta tahun 2025

No	Kota	2023	2024	2025
1	Jakarta Timur	851,613.56 ton	859,045.05 ton	866.562,58ton
2	Jakarta Barat	748.135,24 ton	757.857,05 ton	807.966,6 ton
3	Jakarta Selatan	719.463,79 ton	725.690,82 ton	731.982,61ton
4	Jakarta Utara	504.560,46 ton	509.694,50 ton	624.714,06 ton
5	Jakarta Pusat	311.242,80 ton	312.221,09 ton	313.203,39 ton
6	Kepulauan Seribu	6.634,27 ton	6.739,09 ton	6.627,9 ton

Sumber: SIPSN, 2026

Berdasarkan tabel data di atas, dari enam kota di DKI Jakarta, tercatat bahwa kota Administrasi Jakarta Timur adalah kota dengan angka timbulan sampah terbesar tahun 2025 sebanyak 866.562,58 ton, dan Kepulauan Seribu dengan angka timbulan sampah 6.627,9 ton, Jakarta Timur merupakan salah satu kota administrasi dengan produksi sampah tertinggi sehingga menjadi permasalahan terhadap pengelolaan sampah, Jakarta Timur sebagai wilayah kota administratif terpadat di Jakarta, memiliki kontribusi terbanyak terhadap total timbulan sampah DKI Jakarta. Meskipun kebijakan pemerintah DKI Jakarta telah ada dan sudah di implementasikan akan tetapi jumlah timbulan sampah di DKI Jakarta khususnya Kota Administrasi Jakarta Timur selalu meningkat setiap tahunnya hingga 2025.

Tabel 3: Komposisi Sampah Jakarta Timur Berdasarkan Jenis Sampah Tahun 2025

Tahun	Sisa Makanan	Plastik	Kertas-Karton	Kayu-Ranting	Logam	Kain
2025	49,87	22,95	17,24	3,18	1,08	0,9

Sumber: SIPSN, 2026

Dari tabel data di atas menunjukkan bahwa timbulan sampah didominasi oleh sisa makanan sebesar 49,87%, yang menegaskan bahwa aktivitas konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama sampah dan sekaligus menunjukkan besarnya peluang pengurangan melalui pengelolaan sampah organik berbasis sumber. Selanjutnya, sampah plastik (22,95%) serta kertas dan karton (17,24%) membentuk porsi

signifikan sampah anorganik, mencerminkan pola konsumsi masyarakat perkotaan yang masih tinggi terhadap produk berkemasan dan barang sekali pakai. Adapun jenis sampah lain seperti kayu dan ranting (3,18%), logam (1,08%), dan kain (0,9%) memiliki persentase relatif kecil namun tetap memerlukan strategi penanganan khusus sesuai karakteristik dan potensi daur ulangnya.

Kebijakan pengelolaan sampah di Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dengan tujuan sebagaimana di pasal 3 yaitu untuk (a) mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah; (b) meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan; (c) menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan (d) mewujudkan pelayanan prima.

Kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta telah dibuat dan dilaksanakan, Khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur hingga tahun 2025, akan tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Permasalahan seperti meningkatnya jumlah volume timbunan sampah sehingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti wabah penyakit, bau tidak sedap, dan polusi udara akibat sampah yang menumpuk, hal ini menunjukkan perlunya analisis menyeluruh terhadap implementasi kebijakan yang telah dibuat. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk menjawab sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai tujuan, dan apa saja kendala yang dihadapi terhadap kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk menjawab sejauh mana kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah di implementasikan khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur. Menurut Sugiyono (2020), metode kualitatif suatu kondisi objek dimana penelitian sebagai instrumen teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumen dimana hasil penelitian bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan objek, makna suatu peristiwa, proses, dan interaksi sosial ini (Sugiyono, 2020:25-26). Fokus penelitian ini pada analisis implementasi kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengolahan sampah yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, khususnya pada Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025. Tujuan penelitian ini untuk menggali proses implementasi dan mengidentifikasi dinamika faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam menghadapi permasalahan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025

Untuk menganalisis hasil temuan ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III (1980) sebagai landasan teoretis. Teori ini menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan, untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut di implementasikan. Dalam konteks penelitian ini, teori Edwards III digunakan melalui 4 indikator utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi yang baik harus dilakukan antara pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan serta disampaikan dengan jelas kepada seluruh pihak terkait Dalam hal ini komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik untuk memperoleh respon dari pihak-pihak yang terlibat. Persyaratan pertama agar implementasi kebijakan berjalan dengan efektif adalah bahwa pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan dan perintah kebijakan tersebut harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Tentu saja

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

493

Indexed



komunikasinya harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana di Kota Administrasi Jakarta Timur.

komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan berjalan dengan baik. Komunikasi diawali dari pembuat kebijakan, dalam hal ini DPRD DKI Jakarta, yang menyusun kebijakan pengelolaan sampah untuk kemudian disampaikan kepada pelaksana kebijakan, dalam hal ini Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur sebagai koordinator dengan satuan pelaksana hingga pada struktur yang paling bawah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur. Selanjutnya, pelaksana kebijakan menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam berbagai kegiatan operasional seperti sosialisasi, edukasi, pengangkutan sampah, serta program bank sampah yang ditujukan kepada masyarakat. Komunikasi tersebut disampaikan melalui pertemuan langsung, maupun komunikasi informal antara pelaksana dan masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pada tingkat masyarakat, komunikasi berjalan dengan DPRD DKI Jakarta yang kemudian diwujudkan dalam bentuk partisipasi seperti memilah sampah, menjaga kebersihan lingkungan, dan memanfaatkan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, masyarakat juga memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan melalui komunikasi langsung terkait permasalahan persampahan yang terjadi khususnya di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Sumber Daya

Sumber daya juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan. Saat ini, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur menghadapi kendala karena jumlah pegawai yang kurang memadai dan latar belakang pendidikan yang belum optimal. Diperlukan peningkatan kompetensi dan kapabilitas para pegawai.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang dikatakan oleh DPRD DKI Jakarta dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur yang diakibatkan oleh kurangnya anggaran belanja pegawai yang tertera dalam PJLP sehingga dari hal kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelaksana kebijakan pengelolaan sampah masih mengalami kekurangan dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta, begitu juga yang di sampaikan dengan akademisi kebijakan publik mengatakan bahwa dalam sumber daya harus ada alokasi ke dinas yang memiliki kekurangan sehingga tidak terjadi ketimpangan antara dinas satu dengan dinas yang lainnya dan terjadi mismatch dan menjadi permasalahan baru dimana kurangnya pelaksana baik kualitas dan kuantitas pada tupoksinya dalam menjalankan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kurangnya sumber daya manusia pelaksana menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan timbulan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur. Keterbatasan jumlah SDM pelaksana menyebabkan beban kerja yang harus ditangani menjadi semakin besar, sementara volume sampah yang dihasilkan masyarakat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya di Kota Administrasi Jakarta Timur. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kualitas dan kuantitas SDM pelaksana pengelolaan sampah, serta dapat menghambat pelaksanaan pengurangan sampah, seperti edukasi pemilahan sampah dan pengembangan bank sampah. Akibatnya, sebagian sampah yang seharusnya dapat dikelola sejak dari sumbernya masih berakhir sebagai timbulan sampah yang harus diangkut ke tempat penampungan akhir. Apabila kondisi kekurangan SDM pelaksana pengelolaan sampah, dalam hal ini Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur ini tidak di imbangi dengan penambahan anggaran dan tenaga pelaksana yang memadai, maka kapasitas pelaksanaan pengelolaan sampah akan semakin tertinggal dibandingkan dengan perumbuhan timbulan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Sikap Pelaksana

Dalam hal ini yang dimaksud dengan disposisi sikap adalah tentang bagaimana pejabat berbuat dalam memutuskan sesuatu. Selain itu disposisi juga dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

melakukan suatu tindakan. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka tujuan awal dari suatu kebijakan akan dapat terlaksana dengan baik.

Sikap pelaksana kebijakan berjalan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan pengangkutan sampah yang dilakukan secara rutin setiap hari, reaksi cepat terhadap laporan masyarakat mengenai sampah yang belum terangkut, serta keterlibatan aktif pelaksana dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Petugas juga membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui interaksi langsung di lapangan sehingga memudahkan koordinasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan persampahan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Sikap tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsi. Masyarakat bahkan menilai pelaksana memiliki keramahan, kedekatan, dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur, hal tersebut menunjukkan bahwa sikap pelaksana telah berjalan dengan baik dalam melaksanakan pengelolaan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang mutlak ada dalam implementasi kebijakan. Birokrasi terbentuk atas kesepakatan kolektif yang bertujuan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan bentuk dari suatu birokrasi tidak selalu dalam hal pemerintahan. Struktur birokrasi pelaksana kebijakan pengelolaan sampah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur. Dengan pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas antar instansi maupun antar unit kerja. Pembagian kewenangan tersebut memungkinkan setiap bidang, mulai dari tingkat Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup, hingga unit pelaksana teknis di lapangan, dapat menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi, sehingga koordinasi dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih terarah. Kejelasan struktur ini juga memudahkan penanganan permasalahan persampahan karena setiap persoalan dapat langsung ditangani oleh bidang yang berwenang.

Namun demikian, struktur birokrasi pengelolaan sampah yang ada masih memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya di Kota Administrasi Jakarta Timur, terutama terkait koordinasi antar unit yang terkadang membutuhkan waktu lebih panjang karena harus melalui jalur administratif dan hierarki organisasi. Selain itu, keterbatasan jumlah pelaksana pada beberapa unit menyebabkan pembagian tugas yang telah tersusun dengan baik belum sepenuhnya dapat dijalankan secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan beban kerja di antara pelaksana kebijakan pengelolaan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025

Informasi memiliki peran yang penting dari implementasi kebijakan, karena publik selalu mengasumsikan informasi memainkan peran yang penting dan spesifik. Informasi menjadi faktor pengaruh dalam implementasi. Kurangnya sosialisasi membuat informasi dari isi kebijakan tersebut menjadi penghambat, karena publik selalu mengasumsikan informasi memainkan peran yang penting dan spesifik.

Informasi mengenai sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara maksimal karena upaya yang dilakukan masih berfokus pada sosialisasi langsung yang lebih menekankan aspek teknis pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah dan kegiatan bank sampah, dibandingkan pemahaman terhadap substansi kebijakan itu sendiri. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat hanya mengetahui praktik pengelolaan sampah yang harus dilakukan tanpa memahami tujuan, hak,

kewajiban, serta peran masyarakat yang diatur dalam kebijakan pengelolaan sampah. Rendahnya pemahaman masyarakat juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi dan belum meratanya kegiatan sosialisasi kepada seluruh kelompok masyarakat. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya keterlibatan mereka dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Ketidaktahuan tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur dalam berbagai upaya pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah dari sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, maupun keikutsertaan dalam kegiatan bank sampah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan karena keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan pengelolaan sampah, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Isi kebijakan menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di lapangan. Ketidakjelasan dalam beberapa ketentuan kebijakan menyebabkan pelaksana kebijakan mengalami kesulitan dalam menerapkan aturan secara optimal dan konsisten. Selain itu, kurangnya ketegasan dalam implementasi kebijakan juga berdampak pada belum maksimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, pelanggaran dan sanksi administrasi turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, terutama dalam mendukung penegakan aturan di lapangan. Akibatnya, beberapa isi kebijakan pengelolaan sampah belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan isi kebijakan yang lebih tegas, serta dukungan yang memadai agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Dukungan dalam suatu pelaksanaan menjadi faktor pengaruh dalam implementasi. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat membuat dukungan pelaksana dari suatu kebijakan dapat mempersulit para pelaksana kebijakan tersebut. Dukungan dalam suatu pelaksanaan suatu kebijakan yang kurang dapat mempersulit para pelaksana kebijakan tersebut.

Dukungan masyarakat pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur belum berjalan dengan baik dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, hal yang sama dikatakan oleh DPRD DKI Jakarta bahwasannya pemerintah telah berupaya dalam menurunkan timbulan sampah dari sumbernya dengan sosialisasi bank sampah, meskipun telah di informasikan terkait sosialisasi bank sampah masih banyak yang belum peduli, hal serupa dipertegas oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur bahwasannya masyarakat Jakarta memiliki karakteristik yang beragam sehingga berbeda karakteristik berbeda juga penanganannya khususnya masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Timur sehingga menjadi faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah untuk mengurangi timbulan sampah yang meningkat setiap tahunnya, hal yang sama dikatakan oleh akademisi bahwasannya dalam menerapkan pengelolaan sampah harus dilihat secara menyeluruh bukan hanya outputnya yaitu timbulan sampah akan tetapi yang paling penting pencegahannya seperti edukasi masyarakat sehingga dapat membangun partisipasi masyarakatnya khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur, sehingga pemanfaatan dukungan masyarakat dapat berjalan dengan maksimal dalam menjalankan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pembagian Potensi menjadi faktor pengaruh dalam implementasi. Sumber daya yang belum optimal dimana sarana dan prasarana yang telah ada di gunakan dalam sebuah implementasi adalah sebab kegagalan implementasi yang ditentukan. Pembagian Potensi para pelaku yang terlibat dalam sebuah implementasi adalah sebab dimana kegagalan implementasi ditentukan. Mengimplementasikan kebijakan pasti terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dari implementasi kebijakan, untuk itu perlu adanya usaha meminimalisir resiko dengan memenuhi syarat-syarat implementasi kebijakan.

Pembagian potensi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan berbagai pembenahan. DPRD DKI Jakarta menilai bahwa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah telah memadai, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui perubahan kebiasaan, seperti membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah sejak dari sumbernya. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama sehingga masyarakat perlu berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah. Di sisi lain, akademisi menyatakan bahwa optimalisasi pembagian potensi harus didukung oleh empat aspek utama, yaitu ketersediaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang memadai. Keempat aspek tersebut harus berjalan secara terpadu agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat terlaksana secara efektif dan mampu mengurangi timbunan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, sinergi antara DPRD DKI Jakarta, Suku Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun partisipasi serta tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan sampah. Dengan demikian, penguatan pembagian potensi melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025 belum berjalan dengan optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia akibat minimnya anggaran belanja pegawai yang berdampak pada jumlah dan kualitas pelaksana kebijakan. Selain itu, penerapan isi kebijakan, khususnya sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan sampah, belum dilaksanakan secara tegas sehingga belum mampu memberikan efek jera kepada masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah, keterbatasan teknologi pengolahan sampah seperti kapasitas RDF Rorotan yang belum sebanding dengan volume timbunan sampah, serta rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan juga menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan. Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, tingginya penggunaan produk sekali pakai, serta rendahnya kesadaran untuk mengurangi sampah dari sumbernya menyebabkan volume sampah terus meningkat setiap tahunnya, pengawasan terhadap produsen yang menghasilkan kemasan plastik juga belum berjalan secara optimal sehingga timbunan sampah plastik terus bertambah. Oleh karena itu, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Administrasi Jakarta Timur masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya, penegakan regulasi, partisipasi masyarakat, pengembangan teknologi, serta pengawasan terhadap pengurangan sampah dari sumbernya agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abubakar, I. R., Alshuwaikhat, H. M., & Aina, Y. A. (2022). Solid waste management in developing countries: Challenges and opportunities. *Cleaner Engineering and Technology*, 7, 100399.
- Bundhoo, Z. M. (2018). Solid waste management in least developed countries: current status and challenges faced. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 20, 1867-1877.
- Chen, D. M.-C., Bodirsky, B. L., Krueger, T., Mishra, A., dan Popp, A. (2020). The world's growing municipal solid waste: trends and impacts. *Environmental Research Letters*, 15(7), 074021.
- Chandrappa, R., & Das, D.B. (2012). *Solid waste management: Principles and Practice*. Springer.
- Daniel, H., & Bhada-Tata, P. (2012). What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management. *World Bank*. Vol. 1, Hal. 15-25.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

- Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste mismanagement in developing countries: A review of global issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6), 1060.
- Nugraha, A., Prasetyo, B., & Wulandari, C. (2018). Dampak kesehatan dan lingkungan dari penanganan sampah yang tidak dikelola dengan baik. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(2), 123–131.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian pariwisata (Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D)*. Alfabeta.